

**PENGUNAAN APLIKASI E-SURVEI POLRI ZONA
INTEGRITAS PADA KEPOLISIAN DAERAH
SULAWESI UTARA**

TUGAS AKHIR



**POLITEKNIK NEGERI MANADO
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI BISNIS
2024**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	iii
MOTTO	v
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	Error! Bookmark not defined.
BIOGRAFI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	2
1.3 Rumusan Masalah	2
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	3
1.4.1 Tujuan Penelitian	3
1.4.2 Manfaat Penelitian	3
BAB II KARANGKA PEMIKIRAN TEORITIS.....	4
2.1 Landasan Teori.....	4
2.1.1 Teori Dan Konsep.....	4
2.1.2 E-Survei Polri Zona Integritas	5
2.1.3 Zona Integritas	5
2.2 Hasil Penelitian yang Relevan.....	6
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	9
3.1 Gambaran Umum Perusahaan	9
3.1.1 Sejarah Perusahaan.....	9
3.1.2 Visi Dan Misi Perusahaan	14
3.1.3 Bidang Usaha	14
3.1.4 Sumber Daya Perusahaan.....	15
3.1.5 Organisasi Perusahaan	17
3.2 Gambaran Permasalahan	18
3.3 Pembahasan.....	19
BAB IV PENUTUP	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aplikasi E-Survei Polri Zona Integritas diluncurkan sebagai respons terhadap kebutuhan Polri untuk membangun Zona Integritas secara lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Implementasi E-Survei Polri Zona Integritas diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka menginformasikan kepada masyarakat hasil percepatan reformasi birokrasi yang dilakukan khususnya di satuan kerja, Kementerian PAN-RB menerbitkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pengembangan Zona Integritas (ZI). Menuju Kawasan Bebas Korupsi (WBK) dan Kawasan dan Pelayanan Birokrasi Bersih (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah. Program pengembangan ZI ini merupakan bagian dari evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Polri.

Pengembangan ZI dianggap sebagai model reformasi birokrasi untuk menjaga integritas dan kualitas pelayanan, salah satu aspek penting dalam pencegahan korupsi di pemerintahan. Oleh karena itu, pengembangan ZI di lingkungan kepolisian negara harus dipercepat sesuai tugas pokok dan fungsi kepolisian negara dengan memperkenalkan instrumen ZI yang mencakup enam bidang perubahan di bidang manajemen perubahan, struktur kepengurusan, dan sumber daya manusia. Desain sistem manajemen, penguatan pemantauan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Tindak lanjut reformasi birokrasi di Polda Sulut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian menghasilkan perbaikan program dan kegiatan RBP, khususnya melalui penetapan Zona Integritas (ZI) WBK/WBBM dan implementasi kebijakan publik. layanan Satwil. Untuk mengikuti penilaian ZI, Anda perlu membantu peninjauan data pendukung di Satwil yang akan dinilai agar sesuai dengan format yang ditentukan dalam Panduan Pengembangan ZI WBK/WBBM 2022. Target tersebut belum tercapai karena Satwir Polda Sulut yaitu Polres Bitung pada tahun 2018, Polres Manado, dan Polres Minahasa Selatan pada tahun 2019 berhasil meraih ZI baru yang ketiga. Untuk itu kepemimpinan memerlukan keseriusan dan kesungguhan. Partisipasi dalam keberhasilan pelaksanaan ZI dan evaluasi pelayanan publik.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan identifikasi masalah

1. Kurangnya data satker polda dan polres yang di input pada aplikasi EPZI
2. Kurangnya pemahaman dalam penggunaan aplikasi EPZI

1.3 Rumusan Masalah

1. Meningkatkan data pembangunan Zona Integritas pada polda dan Polres Jajaran
2. Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan kepolisian

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan utama adalah untuk dapat mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi Polri khususnya pada Polda Sulawesi Utara dalam pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan pemerintah yang berkelas dunia, yang sasaran reformasi birokrasi di arahkan pada tiga kondisi yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel ,birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. khususnya Kepada masyarakat Sulawesi Utara.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Bagi Instansi

Dapat terlaksananya Analisa dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas pada satker Polda dan Polres Jajaran Sulawesi Utara.

Bagi Jurusan

Hasil dalam tugas akhir ini bisa digunakan sebagai pedoman oleh kampus dalam membangun Zona Integritas di lingkungan Pendidikan.

Bagi Penulis

Bisa menambah wawasan dalam pengetahuan tentang pembangunan Zona Integritas dalam lingkup pemerintahan yang meliputi Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Sarana Prasarana dan pelayanan public.